

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI PUSKESMAS SIMPANG BABAT
KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PALI
(Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**RELIZA EDI
NIM. 07011281621182**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI PUSKESMAS SIMPANG
BABAT KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PALI
(Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RELIZAEDI

07011281621182

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2020

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukul Kabupaten PALI (Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut)*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Indralaya, 11 Januari 2021

Ketua

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Anggota

2. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

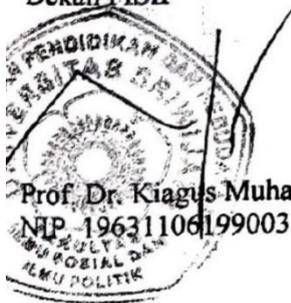


3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



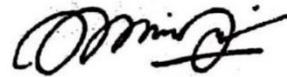
4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”

(QS Al-Insyirah 94: 6-7)

Dengan rahmat Allah Subhanahuwata'ala,

skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Edi Maryono dan Ibu Nila Wati
- Saudaraku, Rozali, S.Kep.,Ners, Pera Pajrin, S.Pd, Olivier Potet, MBA, dan Yunitri,S.Pd.
- Teman – teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016.
- Almamater dan kampus kebangganku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada Pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah Edi Maryono (Alm) & Ibu Nilawati tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungannya baik moral maupun materil yang tiada hentinya sampai saat ini.
2. Saudara-saudaraku, Rozali, S.Kep.,Ners, Pera Pajrin, S.Pd, Olivier Potet, MBA, dan Yunitri, S.Pd yang selalu memberikan motivasi, arahan dan doa dalam proses penulisan skripsi ini dengan penuh perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
7. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Pembimbing pertama penulis yang telah membimbing, mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah membimbing, mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Jahara Rumiatiy, SST selaku Pimpinan Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah memberi izin penelitian dan pengambilan data terkait penelitian penulis di Puskesmas Simpang Babat.
11. Bapak Bambang Alamsyah, Am.Kep selaku Kepala Bidang Tata Usaha Puskesmas Simpang Babat yang telah berkontribusi besar dan bekerja sama dalam penelitian yang dilakukan penulis.
12. Seluruh Staff di Puskesmas Simpang Babat yang telah bekerja sama dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabatku Gincu United Uma, Desi, Pera, Ayuk Tinik, Istik, dan Rima yang telah memberi bantuan dan saling memotivasi di masa-masa perkuliahan, terima kasih untuk selalu ada.
14. Seluruh kerabat dan sahabat jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan penulis guna membangun kearah yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan kalimat, penyajian materi maupun pembahasan. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2021

Penulis

Relizaedi

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI (Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut). Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta memahami faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan Pimpinan Puskesmas Simpang Babat, Pemegang Program Lanjut Usia, Dokter Umum, dan dua masyarakat lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut belum terlaksana dengan baik, seperti halnya pada sistem komunikasi dengan lanjut usia dan partisipasi dari masyarakat lansia belum terlaksana dengan maksimal. Puskesmas Simpang Babat sebagai pelaksana kebijakan diharapkan dapat melaksanakan komunikasi dengan baik terhadap sasaran kebijakan agar terlaksananya kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Kata kunci : Implementasi Standar Pelayanan Minimal Model George C. Edward III

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Indralaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

Implementation of Minimum Service Standards Policy at Puskesmas Simpang Babat in the Penukal Subdistrict of Penukal Abab Lematang Ilir District (Case Study on the Elderly Health Services). Thesis of The Public Administration Department of Social and Political Sciences Faculty in Sriwijaya University. This research examined the implementation of the Minimum Service Standards Policy at the Penukal Subdistrict of Penukal Abab Lematang Ilir District on the case Study of the Elderly Health Services. The purpose of this research is to find out how to implement and understand the supporting factors and inhibitory factors in the implementation of the Minimum Service Standards Policy at Puskesmas Simpang Babat in Elderly Health Services. This research uses a qualitative descriptive with descriptive research methods. The research focus of this research is communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The data was obtained from the primary data, namely through interviews with the Head of Puskesmas Simpang Babat, Elderly Health Services, General Doctors, and two elderly people in the working area of Puskesmas Simpang Babat. Based on the results of the analysis and research can be concluded that, the implementation of the Minimum Service Standards Policy at Puskesmas Simpang Babat in Elderly Health Services has not been implemented properly, as is the case in communication systems with the elderly and the participation of the elderly community has not been carried out to the maximum. Puskesmas Simpang Babat as a policy implementer is expected to carry out a good communication on the policy objectives in order to implement the policy in accordance with the desired objectives.

Keywords :Implementation Minimum Service Standards Model George C. Edward III

Supervisor I



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Supervisor II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Indralaya, Januari 2021
Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
B. Kebijakan Publik	11
C. Implementasi Kebijakan	11
D. Teori Model Implementasi Kebijakan.....	13
E. Penelitian Terdahulu.....	19
F. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Definisi Konsep.....	24
C. Fokus Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Informan Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Teknik Keabsahan Data.....	31

I. Sistematika Penulisan	31
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Gambaran Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	33
2. Gambaran Umum Puskesmas Simpang Babat	35
3. Sejarah Puskesmas Simpang Babat	35
4. Letak Geografis dan Letak Wilayah Puskesmas Simpang Babat.....	36
5. Visi Misi dan Motto Puskesmas Simpang Babat	40
6. Hak dan Kewajiban Pasien Puskesmas Simpang Babat	41
7. Tenaga Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Babat	43
8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian Puskesmas Simpang Babat.....	44
9. Struktur Organisasi Puskesmas Simpang Babat.....	54
B. Hasil dan Pembahasan	55
1. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	56
1) Komunikasi	58
a. Transmisi	59
b. Kejelasan	62
c. Konsistensi.....	64
2) Sumber Daya	66
a. Staf	67
b. Informasi.....	70
c. Wewenang	71
d. Fasilitas.....	72
e. Anggaran	77
3) Disposisi	80
a. Pengangkatan Birokrat	81
b. Insentif.....	82
4) Struktur Birokrasi	85
a. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	86
b. Fragmentasi	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Simpang Babat.....	5
2	Jumlah penduduk usia lanjut berdasarkan kategori lansia di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat	7
3	Jumlah sasaran dan jumlah kunjungan pada usia lanjut di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat	8
4	Penelitian terdahulu	21
5	Fokus penelitian	26
6	Data 8 desa di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat.....	38
7	Data ketenagaan berdasarkan jenis pendidikan dan status kepegawaian Puskesmas Simpang Babat	67
8	Jenis prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas Simpang Babat	75
9	Standar penyelesaian pelayanan Puskesmas Simpang Babat	87
10	Matriks Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Model implementasi kebijakan George C. Edward III	13
2	Kerangka pemikiran diadopsi dari model George C. Edward III	23
3	Logo kabupaten penukal abab lematang ilir	33
4	Peta administrasi wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir	35
5	Puskesmas simpang babat penelitian terdahulu	36
6	Peta wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat	37
7	Struktur organisasi Puskesmas Simpang Babat	54
8	Sosialisasi Dinas Kesehatan Kabupaten PALI di Puskesmas Simpang Babat	62
9	Fasilitas untuk lansia (pegangan tangga masuk gedung puskesmas)	75
10	Fasilitas untuk lansia (pegangan menuju ruang poli lansia dan toilet)	76
11	Ambulance puskesmas simpang babat	76
12	Ruang poli lansia & ruang tunggu	77
13	Kegiatan posyandu lansia di desa wilayah kerja puskesmas simpang babat.....	84
14	Alur pelayanan poli lansia puskesmas simpang babat	87

DAFTAR SINGKATAN

TB	: Tuberkulosis
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KB	: Keluarga Berencana
PTM	: Penyakit Tidak Menular
P2M	: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
PALI	: Penukal Abab Lematang Ilir
PUS	: Pasangan Usia Subur
Usila/Lansia	: Usia Lanjut
Posyandu	: Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu
Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Polindes	: Pondok Bersalin Desa
Pustu	: Puskesmas Pembantu
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
TKS	: Tenaga Kerja Sukarela
Puskesling	: Puskesmas Keliling
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
UGD	: Unit Gawat Darurat

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Surat Tugas Pembimbing
- 2 Kartu Bimbingan Usulan Penelitian
- 3 Lembar Revisi Seminar Proposal
- 4 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
- 5 Kartu Bimbingan Skripsi
- 6 Lembar Revisi Skripsi
- 7 Surat Izin Penelitian di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI
- 8 Surat Balasan dari Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI
- 9 Pedoman Wawancara
- 10 Matriks Wawancara
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah disahkannya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2003:158). Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang atau sebuah peraturan-peraturan dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan atau program-program yang di inginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi melibatkan berbagai elemen seperti, kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang di beri mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, ketepatan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan yang di inginkan dan sebagainya. Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat di pengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan, dalam hal ini implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum karena kebijakan telah di sah kan dalam bentuk hukum, dengan mengerahkan semua sumberdaya

yang ada agar suatu kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya (Agus Purwanto, 2015 : 11).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terdapat standar pelayanan pada pasal 21, yaitu menyatakan bahwa terdapat komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/ tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana, atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

Dari beberapa komponen standar pelayanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam hal ini terdapat suatu kebijakan tentang standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang

dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Kebijakan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan merupakan kebijakan yang dibuat dalam upaya cara pemenuhan dalam memberikan mutu pelayanan dasar minimal di bidang kesehatan sesuai standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur suatu kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat jenis pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yaitu, sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya pembenahan di sektor kesehatan agar tercipta pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap individu. Dalam hal ini mengingat masalah kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang jangkauannya sangat luas hingga ke daerah terpencil, dengan adanya standar pelayanan minimal diharapkan daerah dapat menjadi lebih baik dalam upaya memberikan layanan kesehatan, termasuk perhatian terhadap pelayanan kesehatan dasar di setiap puskesmas sebagai tindak lanjut pemberlakuan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip standar pelayanan minimal, seperti prinsip keterbukaan, konsensus, sederhana, terjangkau, terukur, nyata, bertahap dan akuntabel.

Standar pelayanan minimal yang wajib disediakan di bidang kesehatan salah satunya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk masyarakat di tingkat dasar. Pusat kesehatan masyarakat adalah unit organisasi fungsional dinas kesehatan kota madya dan diberi suatu tanggung jawab sebagai pengelola kesehatan bagi masyarakat dalam tiap wilayah di kecamatan. Puskesmas memiliki peran sebagai salah satu sarana penyedia pelayanan kesehatan dasar dan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Mutu pelayanan merupakan suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang semestinya agar

mutu pada pelayanan kesehatan tetap terjaga, ditinjau dari pandangan pemberi pelayanan kesehatan maupun kepuasan pasien.

Kebijakan yang akan di implementasi pada penelitian ini adalah kebijakan tentang standar pelayanan minimal di puskesmas simpang babat kecamatan penukal studi kasus pada pelayanan kesehatan usia lanjut, yang akan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan. Puskesmas Simpang Babat merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, dan merupakan pusat kesehatan masyarakat yang memiliki wilayah kerja luas yang terdiri dari 8 desa yaitu Desa Babat, Desa Purun, Desa Purun Timur, Desa Suka Raja, Desa Gunung Raja, Desa Gunung Menang, Desa Spantan Jaya, dan Desa Sungai Langan. Selain itu, Puskesmas Simpang Babat memberikan pelayanan dalam segala kebutuhan perawatan, meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan) dengan harapan menciptakan kepuasan terhadap pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Puskesmas Simpang Babat memiliki beberapa jenis pelayanan kesehatan yang disediakan dalam memberikan mutu pelayanan yang maksimal terhadap pasien. Pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang wajib disediakan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan agar tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Simpang Babat yaitu, sebagai berikut :

Tabel 1 : Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Simpang Babat

Jenis-jenis pelayanan	Waktu
1. Pendaftaran	Setiap hari kerja
2. Poli umum	Setiap hari kerja
3. Poli gigi	Setiap hari kerja
4. Poli KIA	Setiap hari kerja

5. Poli Lansia	Setiap hari kerja
6. Poli PTM	Setiap hari kerja
7. Laboratorium	Setiap hari kerja
8. Imunisasi	Setiap hari kerja
9. Pelayanan obat	24 Jam
10. Pelayanan Iva	Setiap hari kerja
11. Konsultasi gizi	Setiap hari kerja
12. Klinik sanitasi	Setiap hari kerja
13. Klinik akopresur	Setiap hari kerja
14. Klinik P2M	Setiap hari kerja
15. Pelayanan poskesdes	Setiap hari kerja
16. Pelayanan promkes	Setiap hari kerja
17. Pelayanan administrasi	Setiap hari kerja
18. Pelayanan UGD dan rawat inap	24 Jam
19. Ambulance	24 Jam

Sumber : Diperoleh dari Puskesmas Simpang Babat

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyatakan bahwa terdapat 12 indikator jenis pelayanan pada standar pelayanan minimal di Kabupaten/Kota, dari 12 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tersebut, penulis memilih salah satu dari beberapa jenis pelayanan yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut merupakan pelayanan kepada seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas. Tujuan umum program lansia di puskesmas adalah meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia untuk mencapai masa tua yang bahagia, berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sedangkan tujuan khusus yaitu meningkatkan kesadaran para lansia untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga, masyarakat dalam menghayati dan mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan

jangkauan pelayanan lansia, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia. Adapun kategori usia lanjut berdasarkan usianya yaitu usia 45-59 tahun merupakan pra usila, usia 60-69 tahun merupakan usia lanjut, usia 70 tahun keatas merupakan usila risti. Proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur pada lansia, yang akan menimbulkan permasalahan terkait aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu perlunya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia sehingga lansia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang di tandai dengan penurunan pada daya tahan fisik sehingga rentan terhadap penyakit.

Dalam pelaksanaannya pada pelayanan usia lanjut di Puskesmas Simpang Babat terdapat suatu permasalahan pada jumlah kunjungan pasien, bahwa jumlah kunjungan pada pasien usia lanjut tersebut tidak sebanding dengan sasaran pasien usia lanjut pada wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Dalam hal ini dengan luasnya wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat maka terdapat banyaknya sasaran pada pasien usia lanjut, namun pada kenyataannya yang terjadi di Puskesmas Simpang Babat bahwa jumlah kunjungan pasien lanjut usia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sarasanya. Berikut merupakan sasaran dan jumlah kunjungan pada pasien usia lanjut di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal.

Tabel 2 : Jumlah penduduk usia lanjut berdasarkan kategori lansia di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat

No	Desa	Jumlah Penduduk Lansia	Jumlah		
			Pra Usila	Usila	Usila Risti
			45-59 tahun	60-69 tahun	≥70 tahun
1	Babat	353	180	110	63
2	Purun	373	190	114	69
3	Purun Timur	57	31	16	10
4	Gunung Raja	114	62	31	21
5	Suka Raja	52	30	14	8
6	Gunung Menang	242	141	62	39

7	Spantan Jaya	122	71	33	18
8	Sungai Langan	112	60	38	14

Sumber : Diperoleh dari Puskesmas Simpang Babat

Tabel 3 : Jumlah sasaran dan jumlah kunjungan pada usia lanjut di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat

No	Wilayah Kerja Puskesmas	Jumlah Sasaran	Jumlah Kunjungan
1	Babat	353	152
2	Purun	373	141
3	Purun Timur	57	17
4	Suka Raja	52	8
5	Gunung Raja	114	28
6	Gunung Menang	242	48
7	Spantan Jaya	122	8
8	Sungai Langan	112	16
Total		1425	418

Sumber : Diperoleh dari Puskesmas Simpang Babat

Berdasarkan tabel di atas terdapat jumlah sasaran pada wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat yaitu terdapat 8 desa yang terdiri dari desa babat jumlah sasaran pada lansia adalah 353 jiwa dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 terdapat 152 kunjungan, desa purun jumlah sasarannya adalah 373 jiwa dengan jumlah kunjungan terdapat 141 pada tahun 2019, desa purun timur terdapat 57 jiwa sasaran lansia dan jumlah kunjungan 17, desa suka raja terdapat 52 jiwa sasaran lansia dan terdapat 8 jumlah kunjungan pada pasien lansia, desa gunung raja terdapat 114 jiwa dan terdapat 28 pada jumlah kunjungan lansia, desa gunung menang terdapat 242 sasaran lansia dan jumlah kunjungannya yaitu 48 kunjungan, desa spantan jaya terdapat 122 sasaran lansia dan terdapat 8 jumlah kunjungan, desa sungai langan terdapat 114 sasaran pada lansia dan terdapat 16 jumlah kunjungan lansia pada tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas jumlah kunjungan pada pasien lansia masih dapat dikatakan lebih sedikit dari sasaran lansia yang ada pada wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Dari ketiga kategori pada lansia yaitu pra usila umur 45-59 tahun, usila 60-

69 tahun, dan usila risti ≥ 70 tahun. Berdasarkan data kunjungan yang di peroleh dari Puskesmas Simpang Babat bahwa kategori usila dan usila risti atau usila tua yang berumur 60-70 tahun keatas yang memiliki jumlah kunjungan paling sedikit. Hal ini masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pada lansia untuk memeriksakan kesehatan di Puskesmas, masyarakat khususnya lansia kurang memahami bahwa pentingnya memeriksakan kesehatan pada pelayanan kesehatan yang disediakan yaitu di puskesmas.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih jelas oleh karena itu penulis mengambil judul tentang “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI (Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut).”

B. Rumusan masalah

Penulis ini membahas tentang Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal dan dapat di simpulkan rumusan masalah penelitian yaitu :
Bagaimana pengimplementasian kebijakan standar pelayanan minimal di puskesmas simpang babat kecamatan penukul kabupaten PALI (Studi kasus pada pelayanan kesehatan usia lanjut) ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI (Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang kebijakan publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI (Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Simpang Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI (Studi Kasus Pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut). Sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Puskesmas Simpang Babat dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agus Purwanto, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi contoh analisis statistic*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal dan Skripsi :

- Istiqomah. 2018. *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Kusuma Bara, Nico. 2014. *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Pada Bus Rapid Transit (BRT) Transmudi Kota Palembang*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Rifa'i, Muhammad. Jurnal Politik Pemerintahan, Vol 9, No.1, 2016 : *Implementasi*

Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Garawangi. Jawa Barat : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 018 Tahun 2015 Tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

